



Proyek Siluman Pengadaan Barang Kecamatan Juga Mendapat Anggaran Pembelian UPS

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, dana siluman pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) atau alat penyimpan daya sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 tak hanya terjadi di Dinas Pendidikan. Proyek itu juga muncul untuk kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat dengan total nilai Rp 268 miliar. “Sebelumnya di sekolah, sekarang UPS untuk kecamatan,” kata Ahok—sapaan Basuki—di Balai Kota, Jumat lalu.

Para camat di Jakarta Barat mengaku kaget atas munculnya anggaran itu. “Waduh, apa lagi itu? Saya tidak pernah usulkan itu,” kata Camat Tamansari, Paris Limbong, saat dihubungi kemarin. Hal senada diungkapkan Camat Kebon Jeruk, Agus Triono, dan Camat Tambora, Mursidin. “Untuk apa UPS ditaruh di kecamatan?” kata Mursidin kemarin.

Sekretaris Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Syarif, mengaku tidak tahu soal anggaran yang muncul dalam APBD 2015 itu. “Saya tidak tahu,” katanya kemarin. Dia meminta Ahok berkomunikasi dengan Dewan agar tak terjadi saling tuding. “Kalau ada temuan yang harus dievaluasi, Gubernur kan bisa saja menyarankan kepada DPRD. Misalnya yang UPS ini dihapus saja,” ujar dia.

Syarif membantah bahwa anggaran pembelian UPS itu berasal dari komisinya. Draft APBD yang sudah dibahas di komisi itu, menurut dia, sudah dilaporkan ke pimpinan Dewan. “Kalau ada pertemuan sebelum pengesahan APBD,

saya tidak tahu,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya, Ahok juga membongkar anggaran pembelian alat penyimpan daya sementara untuk sekolah-sekolah di Jakarta dalam APBD Perubahan 2014. Alokasi pembelian alat berkapasitas 50 ribu volt itu sebesar Rp 33 miliar. Alat ini digunakan untuk sekolah-sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Tempo menelusuri perusahaan pemenang tender pengadaan UPS itu. Salah satunya adalah CV Sinar Bunbunan, yang memasok alat tersebut ke SMA Negeri 25 Jakarta Pusat. Alamat perusahaan ini, yang tercatat di dokumen lelang, adalah di Perkantoran Taman Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun ternyata perusahaan itu tak punya kantor sendiri. Pemiliknya menyewa kantor pengelola rumah kantor setiap tahunnya untuk mendapatkan surat domisili.

“Pemilik adalah teman saya yang mengaku kesulitan ekonomi sehingga tak punya uang sewa kantor sendiri,” kata Harly Tamba, pengelola kompleks perkantoran itu, kepada *Tempo* kemarin. Meski tak memiliki kantor sendiri, Sinar Bunbunan memenangi proyek pengadaan UPS senilai Rp 5.819.484.000.

Kantor pemenang tender lainnya, PT Putra Karunia Hati, juga tak bisa ditemukan sesuai dengan alamat yang tertera di dokumen pemerintah DKI, yaitu Jalan Gading Raya Nomor 73 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. “Tak ada perusahaan tersebut yang berkantor di sini,” kata

Ali, penjaga di kompleks perkantoran itu.

● ERWAN HERMAWAN | LINDA HAIRANI |
YOLANDA ARMINDYA | DINI PRAMITA

Menelisik ‘Dana Siluman’

PERDEBATAN antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan anggota DPRD DKI akhirnya sampai ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumat lalu, Ahok—sapaan Basuki—membawa sejumlah dokumen untuk melaporkan dugaan korupsi dalam penyusunan anggaran DKI.

Berikut ini riwayat anggaran yang menjadi perdebatan itu:

6 Juni 2014

Pemerintah DKI Jakarta mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) ke DPRD Jakarta. Anggaran itu sebesar Rp 81,5 triliun.

6 November 2014

Pemerintah DKI kembali mengajukan KUA/PPAS setelah diminta direvisi oleh DPRD. Nilainya sebesar Rp 79,6 triliun. Pembahasan mangkrak hingga Desember karena komisi-komisi di DPRD belum terbentuk.

6 Desember 2014

KUA/PPAS disetujui oleh DPRD, kemudian menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

27 Januari 2015

RAPBD disahkan dalam sidang paripurna DPRD dengan nilai Rp 73,08 triliun. Namun Ahok curiga karena hasil sidang tidak langsung dicetak (*print out*).

2 Februari 2015

Pemerintah DKI Jakarta mengirimkan dokumen RAPBD 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk *e-budgeting*.

7 Februari 2015

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan RAPBD. Alasannya, rincian anggaran kurang lengkap karena tidak ada tanda tangan dari Ketua Badan Anggaran serta salah format karena dikirim dalam bentuk *e-budgeting*.

9 Februari 2015

DPRD mengirim dokumen RAPBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri karena, menurut mereka, itu hasil pembahasan bersama pemerintah DKI.



- 11 Februari 2015**
Ahok geram atas sikap DPRD dan menduga ada mata anggaran "siluman" yang disusupkan ke dalam RAPBD.
 - 13 Februari 2015**
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menuduh Ahok melanggar aturan karena tidak menyerahkan rancangan yang sudah dibahas DPRD.
 - 14 Februari 2015**
Ahok melaporkan kisruh RAPBD ke Presiden Joko Widodo. Dia mengaku mendapat dukungan dari Jokowi untuk mengungkap anggaran siluman dari DPRD.
 - 24 Februari 2015**
Ahok membeberkan cara DPRD memasukkan "dana siluman" RAPBD 2015 senilai Rp 12,1 triliun.
 - 26 Februari 2015**
DPRD menggunakan hak angket dalam sidang paripurna.
 - 28 Februari 2015**
Ahok mengadukan kasus RAPBD ke KPK.
- DATA DIOLAH OLEH HUSSEIN ABRI YUSUF



Aksi warga mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang digelar oleh Gerakan Teman Ahok di bundaran HI, Jakarta, kemarin. Mereka mendukung langkah Ahok dalam membongkar anggaran siluman.